

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai lembaga negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan organisasi publik yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah diberi identitas nasional yaitu tetap dan mandiri, dituntut melaksanakan fungsinya dengan menerapkan good governance. Karena itu perundang-undangan mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan tugasnya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas.

Pada periode penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu mulai menjadi sorotan dan perhatian. Hampir seluruh kalangan mulai dari peserta Pemilu, para ahli hingga masyarakat awam akan mengawasi dan menilai kinerja KPU. Baik atau buruknya penilaian terhadap kinerja KPU tentu berpengaruh terhadap kredibilitas KPU yang telah diamanahkan oleh undang-undang sebagai penyelenggara Pemilu. Untuk memperoleh suatu kinerja yang baik dan diapresiasi oleh seluruh pihak, tentu kedepannya KPU perlu memikirkan langkah-langkah atau strategi apa yang akan dilakukan dalam menghadapi setiap kendala dan tantangan baik secara teknis maupun nonteknis dalam rangka mewujudkan visi KPU “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Sebagaimana diketahui di dalam struktur internal KPU terdapat dua bagian penting yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pemilu, yaitu komisioner atau anggota KPU dan Sekretariat KPU. Kedua bagian tersebut mempunyai struktur berbeda dimana komisioner KPU merupakan pucuk pimpinan lembaga. Keanggotaan komisioner di kabupaten terdiri dari 5 orang anggota independen

dengan 1 orang diantaranya menjadi ketua KPU. Masa jabatan komisioner KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah lima tahun dan diperbaharui atau diseleksi kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau diperbaharui menjelang pemilu. Sedangkan Sekretariat KPU merupakan bagian penting yang membantu kinerja komisioner untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU yang diisi oleh pegawai organik KPU dan pegawai yang diperbantukan di lembaga KPU.

Untuk mengatur kedua unsur di dalam lembaga KPU yaitu Komisioner dan Sekretariat agar memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan dari semua bidang hubungan kerja yang telah ditetapkan, secara normatif telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam pengaturan hubungan kerja KPU dan Sekretariat pada masing-masing bidang tersebut di atas, KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan sedangkan sekretariat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dan dipertanggungjawabkan kembali ke KPU melalui rapat pleno sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

Meski telah diatur pembagian kerja antara para anggota komisioner dengan Sekretariat pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tetap muncul permasalahan akibat persepsi keliru dalam perbedaan interpretasi mengenai tugas dan kewenangan anggota KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat Kabupaten/Kota dalam peran masing-masing. Pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, komisioner menginginkan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai staf pendukung kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Secara teknis dan administrasi, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu hierarki penyelenggara pemilu. Namun kendala teknis muncul ketika dilakukan koordinasi

dengan Sekretariat KPU di masing-masing tingkatan. Faktor kendala tersebut adalah masalah koordinasi yang lemah antara komisioner dengan staf sekretariat.

Dari hasil kajian FGD Kemitraan yang diteliti oleh Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015:56) mengenai “Studi tentang desain kelembagaan Pemilu yang efektif”, diperoleh temuan bahwa staf sekretariat KPU di daerah belum memiliki satu pemahaman yang utuh bahwa mereka menjadi bagian dari pelaksana pemilu. Komisioner KPU masih menghadapi kendala dalam mengerjakan kesekretariatan sebagai satu tim penyelenggaraan pemilu karena staf kesekretariatan KPU merasa berada di bawah hierarki kewenangan Sekjen/Kepala Sekretariatan (Kasek) KPU Daerah daripada berada di bawah komisioner KPU/KPUD. Hal ini tidak hanya menimbulkan kelambanan respon dari jajaran staf KPU terhadap kebijakan atau penjabaran kebijakan yang dibuat komisioner KPU, tetapi juga menimbulkan potensi konflik antara komisioner KPU dengan staf sekretariat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka, hubungan kerja antara Komisioner dengan Sekretariat KPU dipandang perlu untuk dilakukan secara intens dan memadai mengingat lembaga KPU yang terdiri atas dua unsur yakni anggota KPU yang berasal dari kalangan independen serta unsur sekretariat yang adalah birokrat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS), dengan perbedaan latar belakang ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap tugas dan kewenangan yang berdampak pula terhadap terganggunya hubungan kerja secara kelembagaan.

Selanjutnya dalam hal kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sangat ditentukan pula oleh mutu sumber daya manusia dan kerja Sekretariat, maka unsur Sekretariat yang ditempatkan sebagai unsur pendukung perlu ditata baik dari sisi personil maupun kelembagaanya. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di antaranya dinamika kelembagaan yang terkadang berjalan begitu cepat pada masa penyelenggaraan pemilihan umum, dengan jadwal yang telah diatur untuk pengelolaan kegiatan sehingga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal terkadang tidak berjalan seiring dengan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat karena keterbatasan-keterbatasan sumber daya.

Perbedaan latar belakang anggota KPU yang direkrut secara terbuka tersebut dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah mereka dapat saling melengkapi dalam melakukan pekerjaan sehingga saling mengisi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila mereka tidak saling menyesuaikan diri, membawa egoisme masing-masing sehingga sulit tercapai kekompakan dalam bekerja, sedangkan mereka bersifat kolektif kolegial.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tantangan internal yang ada dalam lembaga penyelenggara pemilu ini sangat besar. Sebagaimana kajian yang dikemukakan oleh Febriyana Tri Achyani dkk. (2015) dalam penelitiannya tentang “Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur” terdapat tiga tantangan internal di dalam lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu yaitu:

1. pertama adalah bagaimana mensinergikan antara anggota KPU yang berbeda latar belakang,
2. kedua mensinergikan antara anggota KPU dengan Sekretariat,
3. dan ketiga adalah mensinergikan seluruh kekuatan dalam lembaga untuk mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

Terkait masalah serta tantangan internal KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang dikemukakan diatas, muncul pula masalah atau tantangan berat lainnya bagaimana jika terjadi kasus kekosongan anggota KPU (komisioner) pada saat penyelenggaraan tahapan Pemilu, seperti kasus kekosongan 5 (lima) anggota KPU kabupaten yang terjadi di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri merupakan satu-satunya diantara 12 KPU Kab/Kota yang berada di Provinsi Riau yang mengalami kekosongan anggota KPU (komisioner) pada saat tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tepatnya pasal 6 mengatur bahwa masa kerja komisioner KPU adalah selama 5 tahun dihitung sejak ditetapkan menjadi anggota KPU dan akan diseleksi kembali setelah periode masa jabatan berakhir. Sayangnya dikarenakan beberapa KPU wilayah propinsi,

kab/kota berbeda waktu masa penetapannya sebagai Komisioner KPU, sehingga terjadi pergantian Komisioner KPU pada masa penyelenggaraan pemilu sedang berjalan. Hal ini tentu dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pertanggung jawaban jika komisioner yang terpilih merupakan orang baru yang tidak mengikuti seluruh proses tahapan Pemilu, apalagi jika setelah masa bakti komisioner periode sebelumnya telah berakhir namun komisioner periode berikutnya belum ditetapkan seperti kasus kekosongan komisioner KPU yang terjadi di KPU Kab. Kepulauan Meranti pada penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014.

Kronologis terjadinya kekosongan 5 (lima) anggota komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu sedang berlangsung, karena telah terbitnya keputusan pemberhentian masa kerja komisioner periode 2010-2014 berdasarkan surat keputusan KPU Provinsi Riau pada tanggal 20 Februari 2014. Jika mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut, sebenarnya komisioner KPU Kepulauan Meranti periode 2009-2014 baru akan berakhir masa jabatannya di bulan November 2014 sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan yang ditandatangani bulan November 2009. Penyebab diterbitkannya keputusan pemberhentian masa kerja komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tepatnya pasal 42 yang mengatur bahwa masa keanggotaan komisioner daerah pemekaran berakhir bersama keanggotaan komisioner daerah induknya. Mengingat bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, akhirnya masa kerja komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti masa kerja komisioner kabupaten induk yaitu Kab. Bengkalis sehingga diterbitkanlah keputusan pemberhentian masa kerja komisioner lebih cepat dari semestinya yang akan berakhir di bulan November 2014.

Selanjutnya penyebab kekosongan komisioner KPU Kab. Kepulauan Meranti pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 karena terlambatnya pembentukan panitia seleksi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini terjadi karena adanya perubahan Tim panitia seleksi anggota KPU Kabupaten

Kepulauan Meranti periode masa kerja 2014-2019 yang sebelumnya telah dibentuk, sehingga perlu dilakukan perubahan panitia seleksi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2014-2019.

Faktor-faktor yang tersebut diatas menjadi latar belakang penyebab terjadinya kekosongan Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014. Sehingga pada saat tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 tengah berlangsung masa jabatan anggota Komisioner di KPU Kabupaten periode 2009-2014 pun berakhir berdasarkan Keputusan Pemberhentian dari KPU Provinsi Riau No. 27.3/KPU-Prov.004/Tahun 2014 terhitung tanggal 20 Februari 2014. Berbeda dengan anggota KPU se kabupaten/kota yang berada di Provinsi Riau dimana pasca SK pemberhentian anggota komisioner lama langsung dilantik anggota KPU periode selanjutnya, anggota komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Meranti periode selanjutnya 2014-2019 baru resmi ditetapkan dan dilantik pada tanggal 1 April 2014 atau tepatnya 8 (delapan) hari menjelang pemungutan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang jatuh pada tanggal 9 April 2014. Artinya pada saat itu terjadi kekosongan jabatan komisioner di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti selama 40 hari dan disaat bersamaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 tetap harus dilaksanakan. Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu tentu akan terasa semakin sulit dalam situasi kekosongan komisioner yang dialami KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, mengingat ada beberapa tahapan yang mesti dilaksanakan pada saat kekosongan komisioner tersebut, yakni tahapan Kampanye dan tahapan Logistik.

Bahwa antara Komisioner KPU dan Sekretariat KPU mempunyai tugas kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan Pemilu. Komisioner KPU mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal penetapan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, sedangkan tugas dan kewenangan dari sekretariat KPU pada saat penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi serta membantu dari keseluruhan tugas dan kewenangan komisioner KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Tentunya keberadaan komisioner KPU pada saat pemilu sangat diperlukan dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu. Meski di dalam UU diatur apabila terjadi kekosongan komisioner tugas dan kewenangan diambil alih

oleh penyelenggara KPU di tingkat atasnya namun keberadaan anggota KPU yang selalu berada di tempat penyelenggaraan pemilu tentu sangatlah penting untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pemilu.

Dalam hal kekosongan komisioner di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Legislatif 2014 lalu secara tugas dan kewenangan selama kekosongan komisioner terjadi diambil alih oleh KPU Provinsi Riau. Proses pengambil alihan tugas dan kewenangan tersebut tentu tidaklah semudah yang dibayangkan, mengingat jarak tempuh antara daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi Riau dipisahkan dengan jarak ratusan kilometer dan juga melalui jalur transportasi laut yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang belum tentu dianggarkan dalam anggaran penyelenggaraan Pemilu. Kemudian fokus untuk pengambil alihan tugas dan kewenangan komisioner di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang terjadi kekosongan tentunya menjadi kurang maksimal, karena pada saat bersamaan KPU Provinsi Riau yang juga melakukan pengawasan dan pengendalian serta fungsi lainnya sebagai penyelenggara di tingkat provinsi agar Pemilu Legislatif Tahun 2014 dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Dalam situasi tersebut tentunya ketergantungan terhadap Sekretariat KPU Kepulauan Meranti semakin besar mengingat seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 tetap harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Terhadap peluang terjadinya pergantian komisioner dan kekosongan komisioner pada saat penyelenggaraan Pemilu sedang berjalan jika dianalisis tidak hanya terjadi karena belum ditetapkannya komisioner periode berikutnya pasca masa bakti komisioner sebelumnya telah berakhir saja seperti yang terjadi di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun pada Pemilu Legislatif tahun 2014. Beberapa penyebab terjadinya kekosongan komisioner dapat disebabkan juga karena komisioner diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), komisioner berhalangan tetap (meninggal/sakit), komisioner di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap dan, komisioner berhenti mengundurkan diri karena beralih ke lembaga atau organisasi lain.

Dari data yang berhasil peneliti kumpulkan pada tahun 2018 dan 2019 yang merupakan masa tahapan penyelenggaraan tahapan PILPRES dan PILEG masih terjadi juga kasus kekosongan komisioner di beberapa daerah seperti dapat di lihat pada tabel berikut¹:

Tabel 1.1

**KPU Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Yang Mengalami Kekosongan
Komisioner Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019**

NO	KPU DAERAH	PENYEBAB KEKOSONGAN	WAKTU KEKOSONGAN	KETERANGAN
1	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	Belum ditetapkannya KPU Prov. NTT periode 2019-2024	27 desember 2018 hingga 08 Februari 2019	Tahapan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019
2	KPU Provinsi Maluku	Belum ditetapkannya KPU Prov. Maluku periode 2019-2024	11Maret 2019 hingga 21 Maret 2019	Tahapan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019
3	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Belum ditetapkannya KPU Prov. Kalimantan Timur periode 2019-2024	05 Februari 2019 hingga 26 Februari 2019	Tahapan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019
4	KPU Kabupaten Lebak	Belum ditetapkannya KPU Kab. Lebak periode 2019-2024	15 Januari 2019 hingga 03 Februari 2019	Tahapan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019
5	KPU Kota Palopo	Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo diberhentikan oleh DKPP	03 Agustus 2018 hingga 24 September 2018	Tahapan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019
6	KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Dua orang Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengundurkan diri dari jabatan Komisioner	24 Mei 2018 hingga 08 Agustus 2018	Tahapan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019

¹ Di akses melalui internet pada tanggal 2 januari 2019, pukul 10.00 WIB

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus kekosongan komisioner KPU pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu kapan saja bisa terjadi, mengingat bahwa ada banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kekosongan komisioner. Mengenai potensi terjadinya kekosongan komisioner KPU diatas, kedepannya tentu diperlukan solusi dan strategi untuk mengatasi masalah ini, karena KPU sendiri sebagai penyelenggara harus dihadapkan dengan tugas sebagai penyelenggara Pemilu di beberapa penyelenggaraan Pemilu yaitu: Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif. Bahkan terkadang di beberapa daerah terjadi keserentakan penyelenggaraan Pemilu sekaligus, tentu akan semakin berat dan akan menjadi masalah jika terjadi kekosongan komisioner pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu sedang berjalan.

Dalam menghadapi situasi pergantian ataupun kekosongan komisioner pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu sedang berjalan, dituntut efektivitas organisasi yakni unsur sekretariat KPU untuk dapat mengatasi segala tantangan dan kendala selama terjadi kekosongan komisioner, agar seluruh tahapan dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mengingat bahwa jika masalah kekosongan komisioner ini tidak tepat dalam mengatasinya maka akan terjadi permasalahan seperti yang terjadi di dua KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Maluku, kekosongan komisioner di wilayah tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya masalah kekurangan surat suara dan tertukarnya surat suara pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu². Kekosongan komisioner di dua daerah tersebut terjadi disaat tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 tengah berjalan, termasuk tahapan distribusi logistik pemilu ke masing-masing TPS.

Menariknya untuk kasus kekosongan Komisioner di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu, tidak terjadi masalah akibat kekosongan komisioner pada saat tahapan pelaksanaan Pemilu sedang berlangsung seperti yang dialami oleh KPU kabupaten yang mengalami kekosongan tersebut di atas. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tetap mampu

² <https://kpu-malukuprov.go.id/kekosongan-komisionerpicu-masalah-pileg-di-maluku/>

melaksanakan tahapan Pemilu tanpa ada masalah sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan, meski mengalami kekosongan komisioner pada pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terjadinya dua hasil yang berbeda dalam kasus kekosongan komisioner pada saat tahapan pelaksanaan Pemilu sedang berlangsung pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 tersebut, dalam sudut pandang tata kelola Pemilu menjadi menarik dan penting untuk di teliti.

Untuk itu maka dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penitilian ini, peneliti akan mediskripsikan secara cermat dan mendalam tentang bagaimana Efektivitas organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, khususnya dalam hal pelaksanaan tahapan Pemilu dalam kondisi kekosongan komisioner pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum, siklus pemilu atau tahapan pemilu merujuk pada sejumlah tahapan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti perumusan peraturan, registrasi pemilih, pendaftaran dan penetapan partai dan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, tabulasi hasil penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu, penyelesaian sengketa, pelaporan hasil, dan pengarsipan hasil dan audit manajemen.

Kemudian dalam kasus kekosongan komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu, mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 terjadi pelaksanaan tahapan pemilu dalam kondisi kekosongan komisioner pada tahapan kampanye dan tahapan logistik.

Dalam kondisi kekosongan komisioner serta belum adanya pengalaman penyelenggaraan Pemilu Legislatif di tingkat kabupaten yang dimiliki oleh KPU

Kabupaten Kepulauan Meranti sejak KPU Kabupaten Kepulauan Meranti di bentuk Tahun 2009, tantangan pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti tentu menjadi semakin berat. Ditambah lagi wilayah geografis yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dipisahkan oleh pulau-pulau dan laut menjadi tantangan atau kendala lainnya dalam hal pelaksanaan tahapan dan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014. Masalah geografis ini juga menjadi tantangan bagi KPU Provinsi Riau dalam proses pengambil alihan tugas kewenangan komisioner selama terjadi kekosongan komisioner KPU di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan beratnya tugas dan tantangan sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten serta situasi kekosongan anggota KPU yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebagaimana dikemukakan di atas. Kenyataannya KPU Kepulauan Meranti tetap mampu mengatasi tantangan tersebut, yakni melaksanakan seluruh tahapan dan program/kegiatan Pemilu Legislatif Tahun 2014 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan PILPRES Tahun 2014 tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penghargaan sebagai penyelenggara terbaik ke- tiga tingkat penyelenggara KPU Kab/Kota se- Provinsi Riau. Hal ini merupakan suatu prestasi yang istimewa dan membanggakan mengingat KPU Kab. Kepulauan Meranti merupakan lembaga penyelenggara KPU Kab/Kota termuda di Provinsi Riau dan belum mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Keberhasilan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh penghargaan tersebut diatas, tentu tidak lepas dari peran/faktor pengaruh efektivitas organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Tahun 2014.

Peneliti berasumsi bahwa keberhasilan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan seluruh tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan baik, meski sempat mengalami kondisi kekosongan komisioner dipengaruhi oleh efektifnya organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk menguatkan asumsi tersebut dan mengetahui apa yang menjadi faktor penunjang efektivitas organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

dalam melaksanakan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 khususnya pada saat kasus kekosongan Komisioner, perlu penelitian secara mendalam dalam mengkaji efektivitas organisasi sekretariat KPU pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Penelitian tentang efektivitas organisasi sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, tidaklah lagi pada aspek-aspek yang pada umumnya dicermati pada penelitian-penelitian lain, yaitu yang terkait dengan persoalan kinerja organisasi publik yang selalu terfokus pada aspek produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, serta responsivitas. Hal ini dikarenakan empat aspek inilah yang justru dalam penelitian ini menjadi luaran atau produk dari apa yang telah dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang telah terbukti berhasil menyelenggarakan Pemilu dengan baik meski sempat mengalami kekosongan komisioner KPU Kabupaten.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan diatas, maka peneliti dalam penelitian ini merumuskan masalah untuk menjawab pertanyaan penelitian: Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Legislatif Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan efektivitas organisasi penyelenggara Pemilu khususnya unsur Sekretariat KPU.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini dapat dijadikan sumbang saran bagi penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum, KPU provinsi dan KPU kab/kota dalam mengatasi tantangan ataupun kendala dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada saat pergantian ataupun kekosongan komisioner pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu sedang berjalan. Kemudian dalam hal ini juga diharapkan agar proses pergantian ataupun penetapan komisioner KPU, sebaiknya dilakukan pada saat sebelum penyelenggaraan Pemilu dilakukan agar dalam proses pelaksanaan maupun pertanggung jawaban tidak menjadi kendala KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu.

